

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, hal tersebut diperkuat dengan beberapa kelompok pekerjaan yang identik dengan kelompok miskin seperti petani dan nelayan tradisional yang menunjukkan ketidakadilan sistem pangan (Diatmika & Rahayu, 2022). Bencana alam dan gejolak geopolitik menyebabkan kerentanan pangan. Produksi pangan meningkat, namun akses terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi cenderung menurun. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi pangan menyebabkan terjadinya permasalahan dalam ketahanan pangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, kondisi terpenuhinya pangan dan gizi dari cakupan negara sampai individu tercemin pada ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun kualitasnya, aman, beragam, memenuhi kebutuhan gizi, merata, serta terjangkau. Ketahanan pangan juga tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya untuk mencapai status gizi normal demi hidup yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan (Sutrisno, 2022).

Pangan merupakan kebutuhan hidup yang penting. Oleh karena itu, Indonesia mengatur pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Pemerintah dan Pemda bertanggungjawab atas ketersediaan pangan, mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan yang berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan prinsip kemandirian pangan dan kedaulatan pangan (Tono et al., 2023). Pangan berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sosial dan politik sebagai sektor strategis pengelolaan pangan terhadap ketahanan pangan. Isu pangan relevan dengan tantangan seperti pertumbuhan populasi, perubahan iklim, alih fungsi lahan dan ketergantungan pada perdagangan internasional. Ketahanan pangan dilengkapi dan disempurnakan dengan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang

secara mandiri menentukan kebijakan pangan untuk menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Konsep kedaulatan pangan dilahirkan pertama kali saat pertemuan petani yang dibentuk tahun 1992 pada Kongres *the National Union of Farmers and Livestock Owners* (UNAG). Kegiatan ini dikoordinasikan oleh petani dari Afrika, Amerika, Asia, Karibia, dan Eropa. Pada bulan April 1996 dilaksanakan pertemuan kedua yang dilaksanakan di Tlaxcala, Mexico. Hasil dari pertemuan tersebut adalah serta meningkatkan kapasitas produksi kebutuhan pangan secara mandiri dengan menempatkan penghormatan terhadap keragaman budaya dan produksi lokal dalam mewujudkan sistem pangan berkelanjutan (Syahyuti et al., 2015). Kedaulatan pangan mengacu pada hak suatu bangsa untuk menentukan kebijakan pangan yang sesuai dengan kebutuhan domestik dan prioritas pada produksi lokal.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki peluang besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mendukung kedaulatan pangan yaitu pemerintah menerbitkan Perpres 109/2020 yang bertujuan mendorong percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Program-program strategis nasional salah satunya yaitu Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*). Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas) menyusun program *food estate* di lima provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur.

Wilayah Nusa Tenggara Timur terletak dalam bioregion Wallacea dan merupakan bagian dari subregion Sunda kecil. Nusa Tenggara Timur dikenal memiliki tingkat endemisitas tinggi yang disebabkan sejarah geologi yang kompleks, Wallacea sendiri merupakan kawasan yang terdiri dari ribuan pulau dan memiliki luas dari satu juta hektar (Chrismiawati et al., 2023). Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan tinggi. Terdapat 12 kabupaten (60%) wilayah di Nusa Tenggara Timur termasuk daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan (Tono et al., 2015).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) capaian indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2 yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Selama tahun 2017 hingga 2021, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati posisi tertinggi pada indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs), Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati provinsi tertinggi pada kerawanan pangan dan gizi (Gaol & Sukim, 2023). Kerawanan pangan terjadi di beberapa kabupaten Nusa Tenggara Timur, salah satunya Kabupaten Lembata. Lembata termasuk kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang mengalami permasalahan pangan, permasalahan tersebut meliputi tingginya angka malnutrisi, pergeseran pola konsumsi masyarakat sehingga mengurangi keberagaman pangan lokal, ketergantungan terhadap pangan dari luar meningkat dan terdapat peningkatan konsumsi makanan instan.

Secara astronomis Kabupaten Lembata terletak pada: 8°10'12"- 8°35'24" LS dan 123°12'1" - 123°55'48" BT (Salam, 2018). Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Curah hujan di Kabupaten Lembata tergolong cukup rendah. Pada tahun 2023, berdasarkan data yang tercatat di Stasiun Meteorologi Gewantana Larantuka, jumlah hujan di Kabupaten Lembata hanya mencapai 110 hari. Topografi Kabupaten Lembata terdiri dari wilayah pesisir, berbukit dan bergunung-gunung dengan puncak tertinggi yaitu 1.319 meter di atas permukaan laut (BPBD Kabupaten Lembata, 2015). Kondisi geografis dan iklim yang kering menjadi tantangan signifikan bagi sektor pertanian, rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola lahan menyebabkan lahan pertanian terbengkalai (Berek, 2018). Permasalahan semakin kompleks dengan kondisi ekonomi masyarakat ketika petani dan nelayan sebagai kelompok tumpuan ketahanan pangan menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi.

Secara kumulatif perkembangan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Lembata tahun 2022-2023 sebesar 12,01% dari tahun baseline 2006 yaitu 36,79% menjadi 24,78% pada 2023. Pada tahun 2020 konsumsi rumah tangga mengalami penurunan atau kontraksi sebesar 3,88% akibat dampak pandemi COVID-19, namun tahun 2021, konsumsi rumah tangga mulai membaik dengan pertumbuhan sebesar 4,88% menandakan pemulihan ekonomi secara bertahap menandakan

pemulihan ekonomi secara bertahap (Pamungkasih, 2023). Berdasarkan persentase tersebut angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Kabupaten Lembata bersifat fluktuatif, tetapi cenderung mengalami penurunan.

Tabel 1. 1 Data Kemiskinan Kab. Lembata

Tahun	Angka Kemiskinan (%)	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Angka Kemiskinan Ekstrem (%)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Jiwa)
2020	26,14	388.577	37.920	14,5	21.034
2021	26,21	421.901	38.750	9,9	14.640
2022	25,18	464.542	37.880	7,98	12.010
2023	24,78	508.575	37.940	2,7	4.130

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, 2023

Terdapat beban pangan di Pulau kecil karena pergeseran pola konsumsi ke beras dan terigu sehingga meningkatkan ketergantungan pangan dari impor dan harga beras di pulau kecil lebih mahal. Disisi lain sumber daya ekonomi masyarakat terkuras untuk konsumsi yang tidak berkualitas mengakibatkan gizi anak dan kesehatan memburuk. Pengeluaran baik makanan dan bukan makanan cenderung tinggi tidak sesuai dengan pendapat masyarakat Kabupaten Lembata. Makanan dalam kelompok pangan yaitu sumber karbohidrat (beras, gandum, dan umbi-umbian), protein nabati dan hewan, lemak sehat, sayuran, buah-buahan dan susu serta olahannya (Sarabella et al., 2024). Sedangkan bukan makanan yaitu rokok, sabun, alat tulis, atau bahan kimia yang digunakan dalam rumah tangga. Rata-rata pengeluaran selama sebulan di Kabupaten Lembata dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 1. 2 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Kab. Lembata

Rata-rata pengeluaran per-kapita sebulan makanan dan bukan makanan di daerah perkotaan Kab. Lembata		
Makanan	2021	372.201
	2022	407.425
	2023	505.908
Bukan Makanan	2021	302.056

Nuraini Razak, 2025

PELUANG DAN TANTANGAN PROGRAM MUDA BERDAYA UNTUK KEDAULATAN PANGAN (MBKP) DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI DESA MERDEKA, KABUPATEN LEMBATA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	2022	317.802
	2023	418.885
Jumlah	2021	674.257
	2022	779.226
	2023	924.794

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, 2023

Kabupaten Lembata perlu menghadapi berbagai tantangan untuk menghadapi permasalahan untuk mencapai kedaulatan pangan diantaranya integrasi antar program atau kegiatan yang masih sulit dilakukan, kesulitan tenaga kesehatan, minimnya pemahaman kelompok, minimnya fasilitas layanan dan program penyelesaian stunting masih bertumpu pada pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah Indonesia cenderung menerapkan konsep ketahanan pangan dibandingkan kedaulatan pangan. Namun, dari segi tujuan program yakni meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat memerlukan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal pedesaan untuk mencapai tingkat kemandirian pangan desa (Kaputra, 2015). Beberapa kecamatan di Kabupaten Lembata mengalami masalah yang sama berdasarkan data wilayah yang menjadi lokus dalam penyelesaian stunting salah satunya yaitu desa Merdeka. Oleh karena itu, pemerintah merancang Program Muda Berdaya untuk Kedaulatan Pangan (MBKP) yang dikembangkan untuk mengatasi isu sosial melalui pendekatan kebudayaan dengan studi ilmiah. Program Muda Berdaya untuk Kedaulatan Pangan (MBKP) merupakan program yang dirancang khusus untuk mengembangkan potensi mahasiswa dalam menjawab berbagai isu dan masalah sosial melalui pendekatan kebudayaan serta pengembangan kedaulatan pangan di Indonesia. Sebanyak 212 peserta ditempatkan di 49 desa di 9 kecamatan untuk melakukan pendataan potensi pangan lokal, pemetaan lahan pangan lokal dan kegiatan ekonomi masyarakat di Lembata.

Selama program ini akan ditemukan berbagai tantangan dan peluang dalam kedaulatan pangan di wilayah Kabupaten Lembata, baik dari peserta magang dan masyarakat. Program ini dirancang untuk mendukung keberlanjutan pangan lokal melalui pemberdayaan masyarakat masyarakat, dengan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) untuk mendukung keberlanjutan pangan lokal

Nuraini Razak, 2025

PELUANG DAN TANTANGAN PROGRAM MUDA BERDAYA UNTUK KEDAULATAN PANGAN (MBKP) DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI DESA MERDEKA, KABUPATEN LEMBATA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

melalui pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan petani Desa Merdeka. Metode *Asset-Based Community Development* (ABCD) menekankan pada identifikasi dan penguatan sumber daya yang terdapat dalam suatu komunitas untuk merencanakan perubahan berkelanjutan dengan fokus pada pengembangan kapasitas sesuai dengan potensi dan aset yang dimiliki (Winarsih & Ismail, 2024). Sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, pangan menjadi tantangan utama di banyak daerah terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi. Melalui pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kemandirian pangan. Upaya pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dapat dijadikan solusi dalam menciptakan sistem pangan yang adil, berkelanjutan dan mandiri.

Isu kedaulatan pangan memiliki relevansi dalam ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial berperan penting dalam memahami dinamika masyarakat. Melalui pendekatan multidisipliner, ilmu sosial mengkaji kesejahteraan masyarakat mencakup aspek ekonomi, sosiologi, antropologi geografi dan lain-lain. Ilmu sosial dapat memberikan landasan teoritis dan praktis mengenai program dengan tujuan kedaulatan pangan. Dalam penelitian ini ilmu sosial berkaitan mendeskripsikan masyarakat dalam mengelola aset dan sumber daya pangan untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi. Selain itu, ketahanan pangan dipengaruhi oleh kondisi geografis. Dengan demikian, ilmu pengetahuan sosial memberikan landasan teoritis dan praktis dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengeksplorasi mengenai kedaulatan pangan di Kabupaten Lembata tepatnya di Desa Merdeka. Minimnya kajian yang meneliti tentang kedaulatan pangan menjadi persoalan penting. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pemangku kebijakan yang ingin menerapkan program serupa. Selain referensi, penelitian ini turut berkontribusi dalam pengembangan kajian akademik mengenai program yang berfokus pada aset masyarakat dan pemanfaatannya dalam mendukung kedaulatan pangan.

Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji peran Program Muda Berdaya untuk Kedaulatan Pangan (MBKP) dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan selama program dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas program dalam meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi aspek teknis dari pelaksanaan program, tetapi juga dikembangkan melalui perspektif Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini akan membahas mengenai “*Peluang dan Tantangan Program Muda Berdaya untuk Kedaulatan Pangan (MBKP) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Desa Merdeka, Kabupaten Lembata*”.

1.2 Rumusan Masalah

Program magang yang dilaksanakan akan memberikan berbagai perspektif bagi peneliti, selain itu kondisi geografis dan ekonomis Desa Merdeka di Kabupaten Lembata akan mempengaruhi kedaulatan pangan yang akan menyempurnakan ketahanan pangan. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran tingkat ketahanan pangan di Desa Merdeka?
2. Bagaimana gambaran peluang dan tantangan dalam pengimplementasian program kedaulatan pangan di Desa Merdeka?
3. Bagaimana peran Muda Berdaya Kedaulatan Pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Desa Merdeka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan ketahanan pangan di Desa Merdeka dan menganalisis hal-hal yang mempengaruhi tingkat ketahanan pangan di Desa Merdeka.
2. Menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program kedaulatan pangan di Desa Merdeka.
3. Menganalisis aset dan potensi lokal yang dimanfaatkan dalam Program Muda Berdaya untuk Kedaulatan Pangan (MBKP) di Desa Merdeka.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengetahuan tentang program Muda Berdaya untuk Kedaulatan Pangan (MBKP). Selain itu, penelitian ini juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran terhadap pemerintah dalam melaksanakan ketahanan pangan untuk kedaulatan pangan di Kab. Lembata.

2. Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan menambah wawasan terkait kedaulatan pangan dan memperluas keterampilan dalam menganalisis program terhadap kedaulatan pangan.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi dalam pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada potensi lokal.
3. Bagi calon peneliti berikutnya dan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif sumber literatur atau referensi, khususnya kedaulatan pangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada eksplorasi Program Muda Berdaya untuk Kedaulatan Pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Desa Merdeka. Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup

1. Tingkat Ketahanan Pangan di Desa Merdeka, Penelitian ini akan mengkaji ketahanan pangan yang meliputi kemampuan masyarakat untuk memproduksi, mengakses dan mengonsumsi pangan lokal.
2. Peluang dan Tantangan dalam pengeimplementasian Program Kedaulatan Pangan, Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai peluang dan tantangan

yang dihadapi selama menjalankan program kedaulatan pangan di Desa Merdeka.

3. Peran Program Muda Berdaya untuk Kedaulatan Pangan (MBKP), Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Program Muda Berdaya untuk Kedaulatan Pangan (MBKP) berperan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Merdeka untuk mencapai kedaulatan pangan melalui pendekatan berbasis aset lokal.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Merdeka, Kabupaten Lembata pada bulan Oktober-Desember 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa, masyarakat dan pemerintah desa yang berperan dalam keberlangsungan program.